

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang salah satu negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak, Indonesia juga kaya akan alam dan budaya sebagai komponen terpenting dalam bidang pariwisata. Kata Pariwisata sendiri berasal dari bahasa sanskerta, yang berasal dari dua kata, yaitu Pari dan Wisatawan, yang kemudian diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat menuju dan singgah di suatu tempat atau beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal.¹

Dikaruniai kombinasi warisan budaya, iklim tropis, keberagaman etnis, daerah tujuan wisata serta berbagai kemajemukan lainnya merupakan daya tarik tersendiri dalam sektor pariwisata Indonesia. Hal ini dapat dijumpai di beberapa daerah yang dijadikan daerah tujuan wisata yang karena kombinasi keberagaman daya tariknya turut menjadikan Indonesia sebagai negara yang harus dijelajahi oleh wisatawan domestik dan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Menjadi salah satu destinasi tujuan wisata dunia tentu saja memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Pada kenyatannya, sektor Pariwisata merupakan salah satu titik fokus pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai

¹ Dasar-Dasar Pariwisata. Gamal Suwanto, SH. 2013. Andi Publishing ,hal.2

peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sektor pariwisata menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM pembangunan pariwisata diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya.

Di tahun 2017 sendiri, sektor pariwisata secara konsisten menjadi program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia “Wonderful Indonesia”. Menjadi salah satu dari 5 sektor prioritas pembangunan 2017 menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan pariwisata nasional. Pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi leading pembangunan yang mengharuskan semua Kementrian mendukung pengembangan pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, dikatakan bahwa tujuan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri

sampingan lainnya serta memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.²

Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepariwisata juga diamanatkan bahwa tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.³

Pariwisata merupakan suatu gejala yang terjadi dimuka bumi ini yang timbul karena adanya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata selalu berkaitan dengan produk serta jasa yang dikelola oleh manusia. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan telah terjadi salah satu industri terbesar di dunia yang merupakan andalan dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pertumbuhan pariwisata yang sangat cepat, telah menarik perhatian khususnya Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Melihat kemajuan industri pariwisata yang begitu pesat, pada Tahun 2020 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 - 2035

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Bab II Pasal 3 Tentang Pedoman Pengembangan Kepariwisata Nasional

³ Perkab Rohul Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Pembangunan Pariwisata

Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk mengelola dan mengembangkan sendiri potensi pariwisata yang ada di daerahnya. Adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada Kabupaten Rokan Hulu untuk mengembangkan dan mengelola sendiri potensi alam dan budaya yang dimilikinya.⁴

Salah satu wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan adalah Kecamatan Rambah. Terutama daerah Desa Menaming. Desa Menaming adalah sebuah daerah yang diresmikan pada Tahun 1920. Desa Menaming yang merupakan desa Kecil di Kaki Bukit Suligi. Desa Menaming memiliki luas wilayah 3.812,99 km² dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 21,71 jiwa/km² dan populasi penduduk mencapai 2.881 jiwa. Wilayah yang terdiri dari 5 dusun,. Rata-rata dengan mata pencaharian dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Melihat keadaan geografis tersebut maka tentu Desa Menaming dari segi sumber daya alam mempunyai tempat yang sangat menarik. Maka tidak heran saat ini Desa Menaming Ramai Dikunjungi Wisatawan. Keberadaan wisata yang dimiliki oleh Desa Menaming salah satunya seperti Danau Menaming.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, bahwa kementerian

⁴ Eka Oktavianti, Dkk, Potensi Wisata Alam menaming Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Kawasan Kabupaten Rokan Hului, Kecamatan Rambah, Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 10, no. 2 (2019): hal.136.

⁵ Badan Pusat statistik (BPS), Rokan Hulu (Diakses pada tanggal 5 November 2021). <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/40/49/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

Pariwisata dan ekonomi kreatif berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Menteri. Di tingkat Kabupaten/Kota, lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR). Namun pada daerah-daerah yang tidak memiliki DISBUDPAR secara khusus, maka lembaga yang mengurus kepariwisataan adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) seperti Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 - 2035 daerah kabupaten Rokan Hulu.

Rokan Hulu memiliki beberapa objek wisata salah satunya adalah wisata Danau Menaming yang berada di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Peraturan Pemerinah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pariwisata Halal. Objek wisata Danau Menaming sering didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah baik itu wisatawan lokal yang berasal dari Rokan Hulu maupun wisatawan Luar Rokan Hulu. Dengan keunikan yang dimiliki, tentunya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung pada objek wisata ini karena tergiur dengan keindahan alam yang dimiliki sehingga sering kali wisatawan yang berkunjung menikmati keindahannya dengan menghabiskan malam di Danau Menaming dengan berkemah, berenang, memancing ikan dan lain sebagainya. Wisata Danau Menaming saat ini masih belum sepenuhnya dikelola dan dikembangkan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok

sadar wisata Danau Menaming Kabupaten Rokan Hulu (10 Mei 2023) menyatakan bahwa masih banyak fasilitas yang dibutuhkan seperti musalla, ruang ganti pakaian, pondok santai, dermaga, pos pemantau, Mandi Cuci dan Kakus (MCK) dan aksesibilitas jalan seperti tangga untuk menanjak ke tempat Wisata Danau Menaming.⁶

Dalam mengelola dan mengembangkan wisata Danau Menaming, pemerintah setempat telah memberikan pinjaman kantor sekretariat untuk melancarkan segala urusan administrasi mengenai pengelolaan objek wisata Danau Menaming yang dikelola oleh Masyarakat Desa Menaming. Masyarakat Desa Menaming sebagai pengelola objek wisata Danau Menaming telah diberi berdasarkan SK dari pemerintah Desa untuk mengeksplorasi keindahan wisata alam tersebut ke media massa. Pemerintah setempat juga bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang berada pada destinasi wisata sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Termasuk kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, dan media massa.

Kemudian pemerintah setempat juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten ,Donatur, dan Dana Desa dalam upaya memberikan bantuan transportasi berupa bot,guna untuk membawa para wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Menaming. Potensi wisata menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat agar dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Objek wisata Danau Menaming memiliki

⁶<https://infopublik.id/read/145460/obyek-wisata-di-menaming-bagai-mutiara-yang-terkubur.html?show=>“Bendungan Menaming Bagai Mutiara yang terkubur”Narasumber:Lahutdin; Masyarakat Desa Menaming.

potensi yang sangat besar sehingga dengan adanya objek wisata yang dimiliki menurut Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran dan lain sebagainya.⁷

Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pariwisata, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan pemerintah kabupaten. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar.

Pada Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 BAB III Pasal 3 Dijelaskan arah pengelolaan Pembangunan Pariwisata di Rokan Hulu Periode Tahun 2020-2035, Pembangunan Kepariwisataannya Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataannya Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.

⁷ Peraturan Pemerintah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Pariwisata

Oleh sebab itu maka pemerintah harus mempunyai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik objek wisata yang baik di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Menaming. Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan Kelompok Masyarakat akan memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan wisata yang semakin maju dan maksimal. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut. Berdasarkan paparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Evaluasi Pemerintahan desa dalam Pengelolaan Objek wisata Danau Menaming berdasar Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu no.03 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu”. Dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan wisata di Danau Menaming.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengelolaan objek wisata desa menaming?
2. Bagaimana Evaluasi pengelolaan objek wisata desa menaming berdasarkan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Peneitian

1. Untuk mengetahui evaluasi hasil pemerintah desa dalam upaya pengelolaan objek wisata desa menaming

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam upaya pengelolaan objek wisata desa menaming

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangan dalam pengembangan pariwisata di desa Menaming Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembangan pariwisata di desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dalam proposal ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi, maka penyusunan skripsi ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Evaluasi Pemerintahan terhadap pengelolaan objek wisata di desa menaming berdasar Peraturan Daerah No.03 Tahun 2020 tentang pembangunan pariwisata rokan hulu periode 2020-2035.

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari evaluasi Pemerintahan terhadap pengelolaan objek wisata di desa menaming Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Desa Menaming.

2.1.1 Profil Desa Menaming

Menaming adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang berjarak 7-kilometer dari pusat kota Pasir Pengaraian. Menaming merupakan salah satu dari 28 desa yang berada di wilayah kecamatan Rambah, Menaming dengan luas wilayah 3.812,99 km² . Menaming terdiri dari dusun Tanjung Godang Satu, dusun Tanjung Godang dua , dusun Pasar, dusun Huta Baru,dan Dusun Kampung Bukit.. Berjarak sekitar 6,5 km dari pusat kota Pasir Pengaraian, 20 km dari Pusat Kabupaten Rokan Hulu dan 4,5 km dari Pusat Kecamatan Rambah.

Desa Menaming merupakan satu diantara desa di Rokan Hulu yang bergerak mengembangkan wisata berbasis masyarakat. Sebagian besar wisatawan adalah berasal dari Dalam Rokan Hulu Maupun Luar Rokan Hulu. Para wisatawan tersebut sampai disana tidak kebingungan mencari tempat Beristirahat dan Makan karna Desa Menaming menyediakan Saung dan Pondok Ikan Bakar, hal itulah yang menjadi nilai jual bagi wisatawan. kelompok masyarakat yang selama ini telah berusaha membangkitkan kesadaran para perempuan,remaja, serta anak-anak untuk terus akurat dalam melihat potensi-potensi yang ada disekitarnya guna untuk mewujudkan hidup berkualitas guna menuju keluarga sehat sejahtera. Salah satu kegiatannya

yang masih berjalan di masyarakat yang menghasilkan berbagai macam produk Makanan Khas desa menaming, yang kualitas, cita rasanya membuat nilai tambah sebagai daya Tarik wisatawan untuk berkunjung Kembali ke objek wisata menaming.

2.1.2 Pemerintahan Desa Menaming

Pemerintah desa atau pemerintah menaming adalah sebuah Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan Desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Surat Keputusan No 2 Tahun 2022 tentang pemerintahan Desa Menaming. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Desa.



2.2 Konsep Evaluasi

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Sangat perlu untuk menentukan bagaimana program-program yang sesungguhnya berjalan, untuk mengukur hasil kondisi-kondisi pelaksanaan dan menyelidiki apakah program dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak , berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaiki. Penyelidikan yang diperlukan ini disebut suatu evaluasi. Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value).

Evaluasi dianggap sebagai cara untuk menerapkan secara sistematis ide pengujian eksperimental atas pilhan kebijakan dalam lingkungan yang terkontrol. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi. Pertanggungjawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat.

Evaluasi adalah : “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.” Rossi dan Freeman menyatakan mengenai evaluasi sebagai berikut :⁸

⁸ Wirawan. 2012. *Evaluasi ; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta:

“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs.”

Menurut kedua pakar evaluasi tersebut evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendisainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Vendung menyatakan sebagai berikut :⁹

“Evaluation is limited to government intervention only, that is, politically or administratively planned social change, like public policies, public programs, and public service.”

Menurut Vendung, evaluasi berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik dan layanan publik. Evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir kedepan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggungjawab, kreatif dan seefisien mungkin.

Sedangkan pandangan lain dari Wilyam N. Dunn, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan,

⁹ *ibid*

nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Untuk menilai keberhasilan suatu program perlu dikembangkan beberapa indikator atau kriteria. Kriteria yang dikembangkan oleh Dunn dikutip dalam Subarsono mencakup lima kriteria sebagai berikut:¹⁰

1. Efektivitas. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Kecukupan. Seberapa jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan. Apakah manfaat telah disaraskan oleh seluruh kelompok masyarakat?
4. Responsivitas. Apakah hasil pelaksanaan telah memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan. Apakah hasil yang dicapai bermfaat?

Dalam buku *Evaluasi Kinerja Perusahaan* mendefinisikan Evaluasi sebagai berikut : “Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara

¹⁰ Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

keduanya , serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.”

2.2.2 Jenis dan Model Evaluasi

Ernest R. House membagi model evaluasi mejadi 8 (delapan) bagian, yaitu sebagai berikut : ¹¹

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi,
2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas,
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas,
4. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial,
5. Model kekritisian seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesedaran yang semakin meningkat,
6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesisional,
7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi, dan

¹¹ Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta:

8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sedangkan membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Evaluasi kebijakan

“kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadi pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan, analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah “metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program”. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).

Program Pengembangan Pariwisata yang merupakan program Pemerintah desa di bidang kepariwisataan yang ada dalam Buku Kebijakan Pembangunan

Desa dan pemberdayaan masyarakat yang disebut (SDGs desa), sesuai dengan jenis evaluasi yang ada maka masuk dalam jenis evaluasi program dan akan di evaluasi dengan tahapan evaluasi program yang sesuai.

c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai “kegiatan aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.

d. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”. Sedangkan membedakan model evaluasi menjadi dua, yaitu :

1. Evaluasi Formatif (Formative evaluation)

yaitu evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengukur hasil pelaksanaan secara periodik
- Untuk mengukur apakah kline/partisipatisan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan
- Untuk mengukur sumber-sumber telah dipergunakan sesuai rencana

2. Evaluasi Sumatif

yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya mengukur indikator-indikator sebagai berikut:

- Untuk mengukur sukses keseluruhan pelaksanaan program
- Untuk mengukur tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai
- Untuk mengukur manfaat program

2.2.3 Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu : ¹²

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.

¹² Wirawan. 2012. *Evaluasi ; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta:

12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi

Berdasarkan jenis evaluasi menurut Wirawan, maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi program, yang dalam hal ini adalah program Pengembangan Pariwisata dalam upaya mewujudkan pariwisata nasional di Kabupaten Rokan Hulu melalui destinasi pariwisata yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Sebagai tujuan evaluasi program ini ialah, mengukur apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan standar, serta dapat mengidentifikasi dan 19 menentukan mana dimensi program yang terlaksana dan yang tidak belum terlaksana.

2.3 Tinjauan tentang Pengembangan Pariwisata

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Kodhyat (2020) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan

dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.¹³, pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.¹⁴ Selanjutnya Burkart dan Medlik menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatankegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.¹⁵

Menurut Sunaryo.B ,yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.¹⁶ Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.¹⁷

¹³ H. Kodhyat. 2010. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta. Grasindo.

¹⁴ Sukawantoro Gamal, 2012. *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta. Andi offset

¹⁵ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-herdiansya-29154-8-unikom_h-i.pdf
Artikel Pengertin Pariwisata.

¹⁶ Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

¹⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1

2.3.2 Jenis dan Macam pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan.

Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, sehingga jenis dan macam-macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya :¹⁸

Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

1. Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
2. Pariwisata regional (regional tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.

¹⁸ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 19.

3. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerahdaerah dalam satu wilayah Indonesia.
4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN.
5. Kepariwisataan internasional (international tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.¹⁹

Menurut objeknya, dimana kegiatan pariwisata dibedakan menjadi :

1. Cultural tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
2. Recuperational tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.

¹⁹ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 20.

3. Commercial tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. Sport tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. Political tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
6. Social tourism yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.
7. Religion tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama islam, dan lain-lain.
8. Marine tourism merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.²⁰

²⁰ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 21.

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, pariwisata ini dapat dibedakan menjadi :

1. Individual tourism yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
2. Family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
3. Group tourism yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau tour operator travel agent.

2.3.3 Unsur-Unsur Pariwisata

1. Manusia (unsur fisik insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata).
2. Tempat (unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri).
3. Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam ditempat tujuan).²¹

²¹ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 13

2.4 Pengelolaan Wisata Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035

Pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata Pari dan kata Wisata. Kata Pari berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata wisata berarti perjalanan. Menurut Wahab pariwisata mengandung tiga unsur antara lain: manusia yakni unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, tempat yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan waktu yakni unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam ditempat tujuan. Jadi pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.²²

Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pariwisata, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan pemerintah kabupaten. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar.

²² Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), hal 21.

Pada Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 BAB III Pasal 3 Dijelaskan arah pengelolaan Pembangunan Pariwisata di Rokan Hulu Periode Tahun 2020-2035, Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.

RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Indikator pariwisata meliputi :

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.²³

Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020 – 2035 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Bertaraf Regional yang Berbasis Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan, dan Berwawasan Wisata Halal Tahun 2035”.

²³ ., “ Budaya Yang Dimiliki Kabupaten Rokan Hulu Merupakan Sumber Daya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kepariwisata an , Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,” no. 6 (2019)

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam.

Menurut Henderson pariwisata merupakan industri yang salah satu industri baru yang mampu selalu dihantui oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun Tujuan sebagaimana yang dimaksud meliputi:²⁴

- a. Meningkatkan pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional yang di dasarkan pada nilai religius.
- b. Mewujudkan pariwisata berbasis Edutriya (Edukasi, Industri dan Budaya) yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.

²⁴ Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat 7, tentang Pembangunan Pariwisata Rokan Hulu

- d. Meningkatkan devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- e. Meningkatkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- f. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien

Pembangunan pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangun pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik

untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapatkan manfaat yang positif.²⁵

Faktor khas pada umumnya berkaitan dengan maksud bepergian, sifat sementara bepergian tersebut, penggunaan fasilitas wisata, dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berekreasi. Kita akui kedua faktor terakhir ini bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak (*sine qua non*) karena orang yang berpariwisata bisnis (misalnya pelajar) haruslah pula mereka itu tetap dianggap sebagai wisatawan, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka. Sisi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandangan negara penerima wisatawan.

Di dalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial ekonomi, baik negara itu sudah maju atau sedang berkembang. Istilah industri pariwisata mungkin terasa sebagai sebutan yang agak aneh bagi mereka yang selama ini menganut batasan pengertian *industry* klasik, yang senantiasa berarti suatu proses dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan.

Struktur industri dapat berbeda menurut hakikat hasil produksinya dan pasaran tempat hasil produksi itu dijual. Juga struktur industri yang dibedakan berdasarkan bahan baku yang dipergunakan dan kondisi tempat bahan itu

²⁵ Andi Hariadi, "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba."

diolah.²⁶ Unsur-unsur pariwisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari :

1. Daya tarik wisata (Attractions)

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Attractions atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan what to see dan what to do. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.²⁷

2. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata (Amenities)

Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum.

Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan

²⁶ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 14

²⁷ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 15

sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenities harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi.

Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenities yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan rest area.²⁸

3. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (Accessibility)

Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.

Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi.

Bagi individual tourist, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan travel agent, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik.²⁹

²⁸ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 16

²⁹ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 17.

4. Keramahan tamahan (Ancillary = hospitality)

Keramah tamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenities yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka kedepannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para stakeholder lainnya.³⁰

2.4 Tinjauan Umum Wisata di Desa Menaming

Potensi obyek wisata alam di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sangat luar biasa namun kini kondisinya masih bagaikan mutiara yang terkubur dan belum bisa dimanfaatkan masyarakat.³¹

Hal ini terlihat dari beberapa obyek wisata alam yang ada di desa tersebut, selain kondisi alamnya masih asri, ini perlu langkah strategis dari pemerintah sehingga potensi itu bisa benar-benar termafaatkan untuk perekonomian masyarakat. Salah satunya, Danau Menaming, belum dipoles pemerintah bagaimana memanfaatkan jadi sebuah potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, meskipun potensinya sangat luar biasa.

³⁰ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 18

³¹ <https://infopublik.id/read/145460/obyek-wisata-di-menaming-bagai-mutiara-yang-terkubur.html?show=>

Kemudian, wisata alam Air Terjun Siayan, Sungai Risik, Sampuran Sei Rao dan Sampuran parlangkitangan, potensi tak kalah indahanya, jika ada sentuhan pembangunan pemerintah, bukan tidak mungkin berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat Desa Menaming Lahutdin Lubis mengatakan, kini potensi-potensi tersebut sudah pernah didokumentasikan dan diserahkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Rohul. Namun hingga hari ini belum ada tindaklanjutnya.

"Kita berharap agar potensi ini bisa dimanfaatkan, sehingga akan terbuka peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Karena pada dasarnya pariwisata alam itu, selain ada manfaatnya untuk masyarakat, juga akan menjadi pendapatan bagi daerah, sebab akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru," kata Lahutdin Lubis, Rabu (17/2).³²

Saat ditanya, tesserkait pembebasan lahannya, Lahutdin menjawab, jika memang ada keseriusan pemerintah, seluruh apartur desa, ninik-mamak dan masyarakat siap bertanggungjawab kalau itu akan diserahkan kepada pemerintah. "Ya kalau pemerintah siap membangunnya, kami siap pula membubuhkan tanda tangan untuk membebaskannya, sehingga dijadikan obyek wisata tujuan utama di Negeri Seribu Suluk," ujarnya Lubis lagi.

Kemudian di tempat yang sama, Kepala Desa (Kades) Menaming Firdaus Daulay menjelaskan, saat ini yang paling utama itu pembukaan akses

³² <https://infopublik.id/read/145460/obyek-wisata-di-menaming-bagai-mutiara-yang-terkubur.html?show=>

infrastruktur jalan ke lokasi obyek wisata tersebut."Jika akses jalan sudah terbuka, secara otomatis akan ada peluang-peluang baru untuk pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat bisa makin sejahtera,"

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dengan perumusan masalah. Mengacu dalam konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi merupakan suatu tindakan untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, mengembangkan, menata dan mengatur semua urusan Bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.³³ dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan Evaluasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Wisata Danau Menaming di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan latar belakang dan teori-teori diatas maka kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada dalam Pengelolaan Wisata Danau Menaming di Kabupaten Rokan Hulu.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris di mana penelitian Yuridis Empiris sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan yang dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan, terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁴

3.2 Metode Pendekatan

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian yuridis empiris penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2013). Hal.205

peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.³⁵ Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat evaluasi pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Danau Menaming di desa menaming Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Menaming Kecamatan Rambah Kaupaten Rokan Hulu. Desa Menaming yang memiliki lima dusun yaitu dusun Tanjung Godang Satu, dusun Tanjung Godang dua , dusun Pasar, dusun Huta Baru,dan Dusun Kampung Bukit.Penelitian Terfokus pada Pemerintah desa menaming.

3.4 Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan melaui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang sehubungan dengan masalah penelitian dari berbagai

³⁵ Notoatmodjo and M M.A., "Metodologi Penelitian," Rake Sarasin (2018): hal.54–68, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

sumber antara lain laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai
kepustakaan yang relevan